

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan sistem informasi saat ini terjadi di berbagai sektor, salah satunya pada sektor pemerintahan. Dengan adanya sistem informasi, maka organisasi/instansi pemerintah dapat menyediakan lebih banyak informasi yang mendukung visi, misi, tujuan dan strategi organisasi sehingga aparatur dapat mengembangkan diri. Sudarmanto (dalam silma sonia 2017:91) menyatakan bahwa organisasi yang berhasil dan efektif merupakan organisasi dengan individu yang di dalamnya memiliki kinerja yang baik. Akhir-akhir ini kinerja telah menjadi terminologi atau konsep yang sering dipakai orang dalam berbagai pembahasan dan pembicaraan, khususnya dalam kerangka mendorong keberhasilan organisasi atau sumber daya manusia. Terlebih, saat ini organisasi dihadapkan pada tantangan kompetisi yang tinggi, era kompetisi pasar global, kemajuan teknologi informasi, maupun tuntutan pelanggan atau penggunaan jasa layanan yang semakin kritis.

Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Jusup (dalam kadek dan gusti 2014:6) mendefinisikan akuntansi sebagai proses pencatatan,

pengkalsifikasian, penjurnalan, pengikhtisaran, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi.

Implementasi sistem informasi akuntansi pada lembaga publik akan memungkinkan kesadaran masalah organisasi, strategi dan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan yang diusulkan dan pemanfaatan dana publik, masing-masing evaluasi kritis terhadap keadaan sebenarnya (Coman & Uta, 2011). Akuntansi digunakan untuk membantu mengolah data keuangan sehingga dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat menyediakan hasil dari data menjadi sebuah informasi kepada pihak yang membutuhkan.

Sistem informasi akuntansi yang digunakan pada masing-masing instansi pemerintah daerah harus dapat di akses dengan mudah baik oleh pihak intern maupun ekstern yang ingin menggunakan informasi yang ada sebagai dasar untuk mengambil sebuah keputusan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Jogiyanto (dalam kadek dan gusti 2014) sistem informasi akuntansi merupakan gabungan dari manusia dan sumber daya lainnya yang bertanggungjawab dalam menyediakan informasi keuangan serta informasi yang diperoleh melalui pengumpulan dan pengolahan data transaksi dalam suatu organisasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Selain mempunyai kewenangan, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut. Oleh karena itu sistem akuntansi menjadi tuntutan sekaligus kebutuhan bagi setiap pemerintah daerah untuk dapat

menghasilkan laporan keuangan yang handal. Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Provinsi Sumatera Barat memiliki 12 kabupaten dan 7 kota, sudah menerapkan sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Pemerintah daerah memiliki sistem khusus untuk mengatur kegiatan operasi keuangannya yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan sistem yang terbaru yang digunakan adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). SIPKD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Artinya dengan menerapkan sistem informasi akuntansi berbasis komputer, seluruh SKPD provinsi Sumatera Barat khususnya Kabupaten Agam sebaiknya mengetahui efektivitas dari sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Dengan diterapkannya SIPKD yang telah memenuhi kelengkapan sistem dalam membuat laporan keuangan, diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan pengguna sistem dan mampu mengintegrasikan data dengan cepat.

Namun fenomena yang terjadi di lapangan seperti yang dikemukakan Sri Mulyani bahwa sistem informasi akuntansi dalam kaitannya dengan laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dimaksimalkan penggunaannya agar seluruh lembaga khususnya pemerintah daerah tidak cepat puas dengan

raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit BPK. Karena kenyataan dilapangan, meski mendapat status WTP tapi korupsinya tetap jalan, bahkan banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Artinya Pemda harus mengevaluasi kembali apa-apa saja yang bisa dimaksimalkan lagi untuk efisiensi anggaran dari mulai perencanaan kegiatan hingga pengambilan keputusan-keputusan. . (<https://kompas-com>. Diakes Senin 14 Januari 2020)

LKPD yang mendapatkan WTP idealnya telah menggunakan sistem informasi akuntansi dengan baik. Data yang disajikan mampu menggambarkan kinerja yang baik dari pengalokasian belanja modal yang tepat sasaran dan tidak hanya menghamburkan uang rakyat untuk belanja yang kurang produktif seperti belanja pegawai yang jumlahnya melampaui belanja modal. Namun, pada kenyataannya pemerintah daerah lebih fokus mendapatkan opini WTP dari pada memperhatikan kinerja dan pengalokasian belanja secara ekonomis, efektif, dan efisien demi kesejahteraan rakyat.

Sumiyani (dalam aditya dan ayu 2014:239) beberapa organisasi mendapatkan keunggulan kompetitif dengan melengkapi sistem informasi baru. Pemakaian sistem informasi ditenggarai dengan prinsip yang mampu memotivasi pemakai sistem untuk bertindak sesuai dengan (*comply*) dan sesuai (*conform*) keyakinannya atas pentingnya sistem informasi tersebut.

Selanjutnya Ni Nengah Wartini mengemukakan bahwa implementasi sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang selama ini digunakan untuk membantu pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diketahui program aplikasi komputer yang digunakan untuk menyusun Laporan

Keuangan Daerah, Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Barang Milik Daerah belum terintegrasi dengan baik. Operator sistem di masing–masing SKPD juga masih tergantung dengan konsultan, sehingga ketika terjadi suatu kesalahan maka memerlukan waktu cukup lama untuk bisa membuat sistem kembali normal yang pada akhirnya mengakibatkan penyajian Laporan Keuangan menjadi tidak tepat waktu.

Seiring diberlakukannya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapannya memerlukan sarana pendukung berupa teknologi informasi yang berbasis sistem. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000).

Keberhasilan atau efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap tindakan manajemen tentang nilai dan investasi sistem informasi sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan manajerial dan implementasi berbagai regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah. Untuk pengembangan sistem juga penting dilakukan pemahaman terhadap kebutuhan pengguna (Chen, *at all*, 2015), karena kepuasan pengguna merupakan salah satu faktor yang penting untuk mengukur kesuksesan atau efektivitas sistem informasi (Xiao dan Dasgupta, 2002). ([http://www.keuangan\\_daerah](http://www.keuangan_daerah). Diakses Senin 14 Januari 2020)

Hasil pemeriksaan BPK pada tiga tahun terakhir, diketahui bahwa terdapat beberapa kelemahan di dalam laporan keuangan pemerintah daerah terutama

berkenaan dengan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta kelemahan pengendalian intern. Ironisnya sejak tahun 2009 hingga sekarang kelemahan tersebut menunjukkan tren peningkatan pada setiap semesternya.

Dari ketiga kondisi tersebut, kelemahan di dalam pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan memberikan kontribusi tertinggi bagi laporan keuangan pemerintah yang buruk. Hal ini merupakan problem besar bagi pemerintah daerah. Kelemahan di dalam sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan antara lain berupa pencatatan transaksi yang tidak akurat atau bahkan transaksi yang tidak dicatat, aset tetap yang belum diinventarisasi hingga pencatatan persediaan yang tidak tertib. Hal ini disebabkan penggunaan sistem informasi akuntansi yang ada di daerah belum dimanfaatkan secara maksimal.

Menurut Sari (2014) pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokkan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan kedalam sebuah laporan keuangan menjadi suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan. Namun kenyataan di lapangan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah masih adanya gangguan pada sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang menggunakan jaringan internet dan jaringan komputer yang menimbulkan kendala dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Fenomena-fenomena diatas memberikan gambaran bahwa sistem informasi akuntansi yang ada di daerah masih belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga penerapan sistem dalam pengelompokkan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi belum dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan masih belum efektif.

Onalapo dan Odetayo (dalam kadek dan gusti 2014:4 ) mengatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap efektivitas organisasi. Efektivitas sistem informasi akuntansi sangat tergantung pada keberhasilan kinerja antara sistem, pemakai (*user*), dan sponsor. Faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi efektivitas sistem informasi akuntansi diharapkan dapat memberikan pengaruh positif yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan sistem dalam menjalankan fungsinya. Penggunaan sistem informasi akuntansi pada keuangan daerah yang menggunakan jaringan internet dan jaringan komputer masih adanya gangguan dan menimbulkan kendala dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga penyimpangan dan kekeliruan di bidang keuangan sangat mungkin terjadi, terlihat dari banyaknya pejabat yang terjerat kasus hukum dan dapat menimbulkan kerugian negara/daerah.

Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD Kabupaten Agam selama lima tahun, dari tahun 2014-2018, BPK memberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), seperti tersaji dalam tabel 1.

Tabel 1.1 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  
Kabupaten Agam Tahun 2014-2018

Tahun	Opini BPK	Keterangan
2014	Wajar Tanpa Pengecualian	BPK tidak menemukan kelemahan sistem pengendalian dalam penyusunan laporan keuangan dan tidak menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah
2015	Wajar Tanpa Pengecualian	
2016	Wajar Tanpa Pengecualian	
2017	Wajar Tanpa Pengecualian	
2018	Wajar Tanpa Pengecualian	

Sumber : LKPD Agam Tahun 2014-2018

Prestasi Opini WTP yang secara konsisten diraih Kabupaten Agam selama lima kali berturut-turut tidak terlepas dari peran jajaran BPK RI, yang selama ini membimbing dan mengarahkan pemerintah kabupaten Agam dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Agam telah bekerja keras berupaya mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hal ini dibuktikan dengan LKPD Kabupaten Agam selama lima (5) tahun berturut-turut berhasil meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (*ppid.Agam.go.id*). Namun berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam pada saat ini kegunaan sistem akuntansi keuangan masih belum efektif,

Berdasarkan wawancara Peneliti dengan bapak Haris Fadila, SE, Kasubid Akuntansi di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam, memaparkan bahwa sistem informasi akuntansi yang ada di lingkungan Pemda Agam pada umumnya masih kurang baik, terutama dalam pembuatan laporan keuangan yang masih melibatkan tenaga pegawai lepas (*outsourcing*). Hal ini disebabkan kemampuan sumber daya manusia yang tersedia ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam, masih belum mampu untuk mengoperasikan sistem informasi akuntansi.



*Soft skill* pegawai khususnya bendahara sebagai operator dari sistem informasi akuntansi juga perlu diperhatikan.

Selain itu berdasarkan pengamatan yang Peneliti lakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam, juga ditemui masih kurangnya kontrol dan pengawasan dalam pengaplikasian sistem informasi akuntansi. Hal ini dilihat dari kurangnya pendampingan dan pengawasan dari pimpinan dalam proses input dan pembuatan laporan keuangan. Untuk memastikan apakah sistem informasi akuntansi sudah berjalan dengan baik, maka diperlukan seorang manager yang mampu menguasai dan ahli dalam bidang akuntansi maupun sistem informasi manajemen. efektivitas sistem informasi akuntansi yang dijalankan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam dalam pembuatan laporan keuangan sangat tergantung dari kualitas menager

Menurut Carolina, (2013) kualitas manajemen sangat penting dalam penyusunan sistem akuntansi keuangan daerah, dengan manajemen yang baik maka pegawai bisa bekerja dengan baik sehingga kinerja pegawai meningkat dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas manajemen memiliki pengaruh terhadap peningkatan penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah, jika di suatu instansi pemerintahan kualitas managemennya jelek maka sistem yang akan dikembangkan tidak akan sesuai dengan rencana instansi dan dengan demikian tujuan instansi pemerintahan tidak akan tercapai

Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Miranani dan Lestiorini (2011) yang menemukan bahwa faktor organisasional yaitu kualitas manajemen dan pelatihan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan

daerah. Penelitian Nurlaela dan Rahmawati (2010) juga menemukan pengaruh kualitas manajemen dalam meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Yati (2014) kualitas management berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem informasi keuangan daerah. Roviyantje (2011) menemukan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban laporan keuangan negara tersebut salah satunya dilakukan dengan menggunakan sistem informasi akuntansi yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam. Dilihat dari berbagai permasalahan yang telah dipaparkan terkait dengan efektivitas sistem informasi akuntansi di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam, Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Management terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi di Pemda Kabupaten Agam”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang sudah diuraikan di atas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi di Pemda Kabupaten Agam?
2. Apakah kualitas manajemen berpengaruh terhadap terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi di Pemda Kabupaten Agam?.

3. Apakah kompetensi sumber daya manusia dan kualitas manajemen berpengaruh terhadap terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi di Pemda Kabupaten Agam?.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitisn ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi di Pemda Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas manajemen terhadap terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi di Pemda Kabupaten Agam.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan kualitas manajemen terhadap terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi di Pemda Kabupaten Agam

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masing-masing pihak sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan referensi untuk melakukan penelaahan dan pengkajian lebih lanjut mengenai masalah yang sama, serta menambahkan pengetahuan pembaca sebagai bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik khususnya untuk kualitas laporan keuangan pada sektor publik.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintahan maupun perusahaan, baik berupa masukan ataupun pertimbangan terkait dengan kompetensi sumber daya manusia, kualitas management terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi keuangan daerah.